



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir

Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);

15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3. Dinas PMP adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat.
4. Pekon adalah sebutan lain dari desa dan desa adat, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7. Jumlah Pekon adalah 116 pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APB-Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN

adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Pekon yang selanjutnya disebut RK-Pekon adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada bank yang ditetapkan.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah pekon sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Pekon Tertinggal dan Pekon Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, yakni pekon yang berada pada kelompok desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada pekon-pekon dengan kinerja terbaik berdasarkan hasil penghitungan skor kinerja oleh pemerintah pusat yang mencakup pengelolaan keuangan pekon, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan pekon.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap pekon sebagaimana dimaksud

pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan pekon dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan pekon sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Pekon terhadap total pendapatan APBPekon dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBPekon.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai Prioritas Dana Desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase Capaian *Output* Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan pekon sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Pekon} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Pekon = Alokasi Formula setiap Pekon
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap pekon terhadap total penduduk Pekon Kabupaten Pesisir Barat
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon Kabupaten Pesisir Barat
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap total luas wilayah Pekon Kabupaten Pesisir Barat
- Z4 = rasio IKG setiap Pekon terhadap IKG Pekon Kabupaten Pesisir Barat
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Pesisir Barat

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesisir Barat ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RK-Pekon melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Pesisir Barat dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RK-Pekon.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Pesisir Barat dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RK-Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan;
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pekon berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Status Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Pekon;
 2. Peraturan Pekon tentang APB-Pekon; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh

- persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Pekon;
 2. Peraturan Pekon tentang APB-Pekon; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. tahap II berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh pekon, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dalam hal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik

(*softcopy*).

- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Peratin menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa Peraturan Pekon tentang APB-Pekon yang telah dievaluasi oleh Camat.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Dokumen yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b point (1) dan (2) telah di teliti kebenaran dan kelengkapannya oleh Camat.
 - c. tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Dokumen yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf c point (1) dan (2) telah di teliti kebenaran dan kelengkapannya oleh Camat.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Peratin menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa Peraturan Pekon tentang APB-Pekon yang telah di evaluasi oleh Camat
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya;
 4. dokumen yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b point (1), (2) dan (3) telah di teliti kebenaran dan kelengkapannya oleh Camat.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melalui Dinas PMP melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui Dinas PMP menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Pekon yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan periode sebanyak satu kali setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Peratin menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa kepada Pekon

Pasal 14

- (1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemotongan Dana Desa dari RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 15

- (1) Setelah Dana Desa masuk ke RK-Pekon Peratin menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RK-Pekon kepada Kepala KPPN Liwa dan Bupati melalui Dinas PMD.
- (2) Salinan lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat oleh Peratin dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Pekon.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat pekon setempat.

Pasal 18

- (1) Peratin bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Bupati melalui Dinas PMP melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RK-Pekon; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 20

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RK-Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RK-Pekon, Bupati melalui Dinas PMP :

- a. meminta penjelasan kepada Peratin mengenai sisa Dana Desa di RK-Pekon tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2)
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RK-Pekon tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa tahap I kurang dari 50% (lima puluh persen)
 - d. Capaian keluaran dana desa tahap I kurang dari 35% (tiga puluh lima persen); dan/atau
 - e. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap III dalam hal :
 - a. Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa tahap II kurang

- dari 90% (sembilan puluh persen);
 - b. Capaian keluaran dana desa tahap II kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. desa belum menyampaikan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat 2 huruf (d) disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji dan diverifikasi oleh Bupati dan hasilnya disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 22

- (1) Bupati menyampaikan dokumen penyaluran Desa yang ditunda penyaluran Dana Desa tahap II menjadi layak salur kepada Kepala KPPN dalam hal telah terpenuhinya persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1).
- (2) Bupati menyampaikan dokumen penyaluran Desa yang ditunda penyaluran Dana Desa tahap III menjadi layak salur kepada Kepala KPPN dalam hal telah terpenuhinya persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2).
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ayat (2) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RK-Pekon.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Peratin yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Peratin yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Pekon telah memenuhi persyaratan penyaluran tahap II sebelum minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RK-Pekon kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Pekon telah memenuhi persyaratan penyaluran tahap III sebelum minggu kedua bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap III yang belum disalurkan

dari RKUN ke RK-Pekon kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan November tahun anggaran berjalan.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai :

- a. penghitungan pembagian Dana Desa ke Setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- c. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); dan
- d. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Peratin melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RK-Pekon dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Peratin menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RK-Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RK-Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RK-Pekon dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKP lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan mengenai laporan konvergensi pencegahan *stunting* dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 149

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,


EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 Januari 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON
DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA DESA MASING-MASING PEKON

NO	Id.Kab/Kec/ Pekon	Nama Kec/Pekon	PAGU				JUMLAH DANA DESA / PEKON
			Dana Desa	Pagu Tahap 1 (40%)	Pagu Tahap 2 (40%)	Pagu Tahap 3 (20%)	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
I	18.13.01	PESISIR TENGAH					
1	18.13.01.2001	WAY REDAK	890,857,000	356,342,800	356,342,800	178,171,400	890,857,000
2	18.13.01.2002	SERAY	1,069,484,000	427,793,600	427,793,600	213,896,800	1,069,484,000
3	18.13.01.2003	KAMPUNG JAWA	995,472,000	398,188,800	398,188,800	199,094,400	995,472,000
4	18.13.01.2004	RAWAS	1,189,872,000	475,948,800	475,948,800	237,974,400	1,189,872,000
5	18.13.01.2006	SUKA NEGARA	814,998,000	325,999,200	325,999,200	162,999,600	814,998,000
6	18.13.01.2007	PAHMUNGAN	932,947,000	373,178,800	373,178,800	186,589,400	932,947,000
JUMLAH			5,893,630,000	2,357,452,000	2,357,452,000	1,178,726,000	5,893,630,000
II	18.13.02	PESISIR SELATAN					
1	18.13.02.2001	N.R. TENUMBANG	1,016,476,000	406,590,400	406,590,400	203,295,200	1,016,476,000
2	18.13.02.2002	SUKARAME	993,168,000	397,267,200	397,267,200	198,633,600	993,168,000
3	18.13.02.2003	PELITA JAYA	949,700,000	379,880,000	379,880,000	189,940,000	949,700,000
4	18.13.02.2004	SUMUR JAYA	987,194,000	394,877,600	394,877,600	197,438,800	987,194,000
5	18.13.02.2005	TANJUNG JATI	785,123,000	314,049,200	314,049,200	157,024,600	785,123,000
6	18.13.02.2006	PAGAR DALAM	848,910,000	339,564,000	339,564,000	169,782,000	848,910,000
7	18.13.02.2007	TANJUNG SETIA	1,157,635,000	463,054,000	463,054,000	231,527,000	1,157,635,000
8	18.13.02.2008	BIHA	1,234,790,000	493,916,000	493,916,000	246,958,000	1,234,790,000
9	18.13.02.2009	WAY JAMBU	1,218,282,000	487,312,800	487,312,800	243,656,400	1,218,282,000
10	18.13.02.2010	MARANG	1,605,917,000	642,366,800	642,366,800	321,183,400	1,605,917,000
11	18.13.02.2011	TANJUNG RAYA	1,317,628,000	527,051,200	527,051,200	263,525,600	1,317,628,000
12	18.13.02.2012	BANGUN NEGARA	974,342,000	389,736,800	389,736,800	194,868,400	974,342,000
13	18.13.02.2013	ULOK MANIK	969,215,000	387,686,000	387,686,000	193,843,000	969,215,000
14	18.13.02.2014	PAKU NEGARA	1,148,023,000	459,209,200	459,209,200	229,604,600	1,148,023,000
15	18.13.02.2015	TULUNG BAMBAN	1,242,029,000	496,811,600	496,811,600	248,405,800	1,242,029,000
JUMLAH			16,448,432,000	6,579,372,800	6,579,372,800	3,289,686,400	16,448,432,000
III	18.13.03	LEMONG					
1	18.13.03.2001	TANJUNG JATI	983,941,000	393,576,400	393,576,400	196,788,200	983,941,000
2	18.13.03.2002	TANJUNG SAKTI	864,241,000	345,696,400	345,696,400	172,848,200	864,241,000
3	18.13.03.2003	WAY BATANG	922,449,000	368,979,600	368,979,600	184,489,800	922,449,000
4	18.13.03.2004	LEMONG	1,136,080,000	454,432,000	454,432,000	227,216,000	1,136,080,000
5	18.13.03.2005	CAHAYA NEGERI	929,518,000	371,807,200	371,807,200	185,903,600	929,518,000
6	18.13.03.2006	MALAYA	1,325,596,000	530,238,400	530,238,400	265,119,200	1,325,596,000
7	18.13.03.2007	BAMBANG	1,004,302,000	401,720,800	401,720,800	200,860,400	1,004,302,000
8	18.13.03.2008	PAGAR DALAM	1,145,392,000	458,156,800	458,156,800	229,078,400	1,145,392,000
9	18.13.03.2009	BANDAR PUGUNG	983,974,000	393,589,600	393,589,600	196,794,800	983,974,000
10	18.13.03.2010	PENENGAHAN	1,456,280,000	582,512,000	582,512,000	291,256,000	1,456,280,000
11	18.13.03.2011	RATA AGUNG	1,047,283,000	418,913,200	418,913,200	209,456,600	1,047,283,000
12	18.13.03.2012	SUKAMULYA	1,086,009,000	434,403,600	434,403,600	217,201,800	1,086,009,000
13	18.13.03.2013	PARDA HAGA	941,042,000	376,416,800	376,416,800	188,208,400	941,042,000
JUMLAH			13,826,107,000	5,530,442,800	5,530,442,800	2,765,221,400	13,826,107,000
IV	18.13.04	PESISIR UTARA					
1	18.13.04.2001	KURIPAN	832,773,000	333,109,200	333,109,200	166,554,600	832,773,000
2	18.13.04.2002	PADANG RINDU	878,295,000	351,318,000	351,318,000	175,659,000	878,295,000
3	18.13.04.2003	NEGERI RATU	929,577,000	371,830,800	371,830,800	185,915,400	929,577,000
4	18.13.04.2004	KERBANG DALAM	883,399,000	353,359,600	353,359,600	176,679,800	883,399,000
5	18.13.04.2005	KOTA KARANG	897,552,000	359,020,800	359,020,800	179,510,400	897,552,000
6	18.13.04.2006	BALAM	882,679,000	353,071,600	353,071,600	176,535,800	882,679,000
7	18.13.04.2007	WAY NARTA	803,676,000	321,470,400	321,470,400	160,735,200	803,676,000
8	18.13.04.2008	KERBANG LANGGAR	848,711,000	339,484,400	339,484,400	169,742,200	848,711,000
9	18.13.04.2009	WALUR	910,297,000	364,118,800	364,118,800	182,059,400	910,297,000
10	18.13.04.2010	BATU RAJA	871,439,000	348,575,600	348,575,600	174,287,800	871,439,000
11	18.13.04.2011	PEMANCAR	936,260,000	374,504,000	374,504,000	187,252,000	936,260,000
12	18.13.04.2012	GEDAU	889,173,000	355,669,200	355,669,200	177,834,600	889,173,000
JUMLAH			10,563,831,000	4,225,532,400	4,225,532,400	2,112,766,200	10,563,831,000
V	18.13.05	KARYA PENGGAWA					
1	18.13.05.2001	KEBUAYAN	798,739,000	319,495,600	319,495,600	159,747,800	798,739,000
2	18.13.05.2002	WAY NUKAK	964,330,000	385,732,000	385,732,000	192,866,000	964,330,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
3	18.13.05.2003	WAY SINDI	1,254,428,000	501,771,200	501,771,200	250,885,600	1,254,428,000
4	18.13.05.2004	PENENGGAHAN	1,138,446,000	455,378,400	455,378,400	227,689,200	1,138,446,000
5	18.13.05.2005	MENYANCANG	853,224,000	341,289,600	341,289,600	170,644,800	853,224,000
6	18.13.05.2006	LA'AY	808,452,000	323,380,800	323,380,800	161,690,400	808,452,000
7	18.13.05.2007	PENGGAWA V ULU	987,553,000	395,021,200	395,021,200	197,510,600	987,553,000
8	18.13.05.2008	PENGGAWA V TENGAH	852,816,000	341,126,400	341,126,400	170,563,200	852,816,000
9	18.13.05.2009	WAY SINDI UTARA	774,006,000	309,602,400	309,602,400	154,801,200	774,006,000
10	18.13.05.2010	TEMBAKAK WAY SINDI	869,675,000	347,870,000	347,870,000	173,935,000	869,675,000
11	18.13.05.2011	WAY SINDI HANUAN	852,876,000	341,150,400	341,150,400	170,575,200	852,876,000
12	18.13.05.2012	ASAHAN WAY SINDI	818,872,000	327,548,800	327,548,800	163,774,400	818,872,000
JUMLAH			10,973,417,000	4,389,366,800	4,389,366,800	2,194,683,400	10,973,417,000
VI	18.13.06	PULAU PISANG					
1	18.13.06.2001	PASAR PULAUPISANG	929,098,000	371,639,200	371,639,200	185,819,600	929,098,000
2	18.13.06.2002	LABUHAN	890,349,000	356,139,600	356,139,600	178,069,800	890,349,000
3	18.13.06.2003	BANDAR DALAM	820,165,000	328,066,000	328,066,000	164,033,000	820,165,000
4	18.13.06.2004	PEKON LOK	827,843,000	331,137,200	331,137,200	165,568,600	827,843,000
5	18.13.06.2005	SUKADANA	852,577,000	341,030,800	341,030,800	170,515,400	852,577,000
6	18.13.06.2006	SUKA MARGA	830,971,000	332,388,400	332,388,400	166,194,200	830,971,000
JUMLAH			5,151,003,000	2,060,401,200	2,060,401,200	1,030,200,600	5,151,003,000
VII	18.13.07	WAY KRUI					
1	18.13.07.2001	PAJAR BULAN	831,446,000	332,578,400	332,578,400	166,289,200	831,446,000
2	18.13.07.2002	BUMI WARAS	772,061,000	308,824,400	308,824,400	154,412,200	772,061,000
3	18.13.07.2003	BANJAR AGUNG	793,344,000	317,337,600	317,337,600	158,668,800	793,344,000
4	18.13.07.2004	PENGGAWA V ILIR	950,312,000	380,124,800	380,124,800	190,062,400	950,312,000
5	18.13.07.2005	ULU KRUI	1,046,735,000	418,694,000	418,694,000	209,347,000	1,046,735,000
6	18.13.07.2006	GUNUNG KEMALA	1,138,335,000	455,334,000	455,334,000	227,667,000	1,138,335,000
7	18.13.07.2007	LABUHAN MANDI	959,862,000	383,944,800	383,944,800	191,972,400	959,862,000
8	18.13.07.2008	SUKABARU	845,460,000	338,184,000	338,184,000	169,092,000	845,460,000
9	18.13.07.2009	PENGGAWA LIMA	768,233,000	307,293,200	307,293,200	153,646,600	768,233,000
10	18.13.07.2010	GUNUNG KEMALA TIMUR	837,342,000	334,936,800	334,936,800	167,468,400	837,342,000
JUMLAH			8,943,130,000	3,577,252,000	3,577,252,000	1,788,626,000	8,943,130,000
VIII	18.13.08	KRUI SELATAN					
1	18.13.08.2001	BALAI KENCANA	1,010,577,000	404,230,800	404,230,800	202,115,400	1,010,577,000
2	18.13.08.2002	WAY SULUH	906,356,000	362,542,400	362,542,400	181,271,200	906,356,000
3	18.13.08.2003	WAY NAPAL	885,479,000	354,191,600	354,191,600	177,095,800	885,479,000
4	18.13.08.2004	PADANG HALUAN	954,930,000	381,972,000	381,972,000	190,986,000	954,930,000
5	18.13.08.2005	LINTIK	903,504,000	361,401,600	361,401,600	180,700,800	903,504,000
6	18.13.08.2006	WALUR	1,024,664,000	409,865,600	409,865,600	204,932,800	1,024,664,000
7	18.13.08.2007	PEMERIHAN	820,495,000	328,198,000	328,198,000	164,099,000	820,495,000
8	18.13.08.2008	MANDIRI SEJATI	801,867,000	320,746,800	320,746,800	160,373,400	801,867,000
9	18.13.08.2009	PADANG RAYA	879,247,000	351,698,800	351,698,800	175,849,400	879,247,000
10	18.13.08.2010	SUKA JADI	883,262,000	353,304,800	353,304,800	176,652,400	883,262,000
JUMLAH			9,070,381,000	3,628,152,400	3,628,152,400	1,814,076,200	9,070,381,000
IX	18.13.09	NGAMBUR					
1	18.13.09.2001	SUMBER AGUNG	1,026,608,000	410,643,200	410,643,200	205,321,600	1,026,608,000
2	18.13.09.2002	ULOK MUKTI	1,416,825,000	566,730,000	566,730,000	283,365,000	1,416,825,000
3	18.13.09.2003	N.R. NGAMBUR	1,251,455,000	500,582,000	500,582,000	250,291,000	1,251,455,000
4	18.13.09.2004	PEKON MON	1,303,545,000	521,418,000	521,418,000	260,709,000	1,303,545,000
5	18.13.09.2005	G.C. KUNINGAN	1,293,268,000	517,307,200	517,307,200	258,653,600	1,293,268,000
6	18.13.09.2006	SUKA BANJAR	1,192,095,000	476,838,000	476,838,000	238,419,000	1,192,095,000
7	18.13.09.2007	SUKA NEGARA	1,039,255,000	415,702,000	415,702,000	207,851,000	1,039,255,000
8	18.13.09.2008	MUARA TEMBULIH	894,799,000	357,919,600	357,919,600	178,959,800	894,799,000
9	18.13.09.2009	BUMI RATU	1,354,146,000	541,658,400	541,658,400	270,829,200	1,354,146,000
JUMLAH			10,771,996,000	4,308,798,400	4,308,798,400	2,154,399,200	10,771,996,000
X	18.13.10	NGARAS					
1	18.13.10.2001	NEGERI RATU NGARAS	1,196,814,000	478,725,600	478,725,600	239,362,800	1,196,814,000
2	18.13.10.2003	KOTA BATU	997,771,000	399,108,400	399,108,400	199,554,200	997,771,000
3	18.13.10.2004	MULANG MAYA	1,203,111,000	481,244,400	481,244,400	240,622,200	1,203,111,000
4	18.13.10.2005	RAJABASA	972,755,000	389,102,000	389,102,000	194,551,000	972,755,000
5	18.13.10.2006	PARDASUKA	981,706,000	392,682,400	392,682,400	196,341,200	981,706,000
6	18.13.10.2017	PADANG DALAM	1,029,007,000	411,602,800	411,602,800	205,801,400	1,029,007,000
7	18.13.10.2018	SUKA MAJU	1,057,396,000	422,958,400	422,958,400	211,479,200	1,057,396,000
8	18.13.10.2019	SUKARAME	1,077,729,000	431,091,600	431,091,600	215,545,800	1,077,729,000
9	18.13.10.2020	BANDAR JAYA	900,514,000	360,205,600	360,205,600	180,102,800	900,514,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
JUMLAH			9,416,803,000	3,766,721,200	3,766,721,200	1,883,360,600	9,416,803,000
XI	18.13.11	BANGKUNAT					
1	18.13.11.2001	PAGAR BUKIT	1,562,310,000	624,924,000	624,924,000	312,462,000	1,562,310,000
2	18.13.11.2002	TANJUNG KEMALA	1,491,091,000	596,436,400	596,436,400	298,218,200	1,491,091,000
3	18.13.11.2003	SUKAMARGA	1,594,496,000	637,798,400	637,798,400	318,899,200	1,594,496,000
4	18.13.11.2004	KOTA JAWA	1,854,199,000	741,679,600	741,679,600	370,839,800	1,854,199,000
5	18.13.11.2005	PENYANDINGAN	1,263,003,000	505,201,200	505,201,200	252,600,600	1,263,003,000
6	18.13.11.2006	BANDAR DALAM	1,906,065,000	762,426,000	762,426,000	381,213,000	1,906,065,000
7	18.13.11.2007	WAY HARU	1,584,233,000	633,693,200	633,693,200	316,846,600	1,584,233,000
8	18.13.11.2008	PEMERIHAN	1,451,075,000	580,430,000	580,430,000	290,215,000	1,451,075,000
9	18.13.11.2009	SUKANEGERI	1,406,738,000	562,695,200	562,695,200	281,347,600	1,406,738,000
10	18.13.11.2010	SUMBEREJO	1,141,707,000	456,682,800	456,682,800	228,341,400	1,141,707,000
11	18.13.11.2011	SIRING GADING	983,224,000	393,289,600	393,289,600	196,644,800	983,224,000
12	18.13.11.2012	WAY TIAS	1,033,034,000	413,213,600	413,213,600	206,606,800	1,033,034,000
13	18.13.11.2013	TANJUNG REJO	1,315,936,000	526,374,400	526,374,400	263,187,200	1,315,936,000
14	18.13.11.2014	PAGAR BUKIT INDUK	1,362,868,000	545,147,200	545,147,200	272,573,600	1,362,868,000
JUMLAH			19,949,979,000	7,979,991,600	7,979,991,600	3,989,995,800	19,949,979,000
JUMLAH TOTAL (I s.d XI)			121,008,709,000	48,403,483,600	48,403,483,600	24,201,741,800	121,008,709,000

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESIRIS BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 Januari 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PESIRIS BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP PEKON
KABUPATEN PESIRIS BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Pekon	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula																Total Bobot	Alokasi Formula	Dana Desa Pekon	per- (rupiah)				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot								
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Pend. Miskin	Rasio JPM Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(11)+(16)+(19)+(22)	(24)	(25)=(6)+(7)+(10)+(23)									
1	Pesisir Tengah	Way Redak	662,806,000	Berkembang	6	-	51.984	102	-	1052	0.0070	0.0007	207	0.0064	0.0032	5.887	0.002	0.000	27.8367	0.0062	0.0016	0.0057	228.051,000	890.857,000									
2	Pesisir Tengah	Serai	662,806,000	Maju	8	-	56.122	30	-	2129	0.0141	0.0014	463	0.0143	0.0071	0.737	0.000	0.000	29.7551	0.0066	0.0017	0.0103	406.678,000	1.069.484,000									
3	Pesisir Tengah	Kampung Jawa	662,806,000	Berkembang	8	-	54.290	64	-	2225	0.0147	0.0015	345	0.0106	0.0053	17.525	0.006	0.001	12.2599	0.0027	0.0007	0.0084	332.666,000	995.472,000									
4	Pesisir Tengah	Rawas	662,806,000	Berkembang	9	-	55.943	32	-	2753	0.0182	0.0018	625	0.0193	0.0096	11.609	0.004	0.001	21.8764	0.0049	0.0012	0.0133	527.066,000	1.189.872,000									
5	Pesisir Tengah	Suka Negara	662,806,000	Berkembang	5	-	57.467	15	-	970	0.0064	0.0006	104	0.0032	0.0016	6.591	0.002	0.000	22.3723	0.0050	0.0012	0.0038	152.192,000	814.998,000									
6	Pesisir Tengah	Pahmungan	662,806,000	Berkembang	7	-	54.779	50	-	1228	0.0081	0.0008	252	0.0078	0.0039	2.906	0.001	0.000	35.0799	0.0078	0.0020	0.0068	270.141,000	932.947,000									
7	Pesisir Selatan	N.R. Tenumbang	662,806,000	Tertinggal	7	-	54.241	67	-	1374	0.0091	0.0009	246	0.0076	0.0038	43.983	0.015	0.002	34.6560	0.0077	0.0019	0.0089	353.670,000	1.016.476,000									
8	Pesisir Selatan	Sukarame	662,806,000	Tertinggal	7	-	53.126	88	-	872	0.0058	0.0006	256	0.0079	0.0040	30.856	0.011	0.002	39.4762	0.0088	0.0022	0.0083	330.362,000	993.168,000									
9	Pesisir Selatan	Pelita Jaya	662,806,000	Berkembang	6	-	56.662	25	-	1173	0.0078	0.0008	145	0.0045	0.0022	40.323	0.014	0.002	38.1903	0.0085	0.0021	0.0072	286.894,000	949.700,000									
10	Pesisir Selatan	Sumur Jaya	662,806,000	Berkembang	6	-	56.231	28	-	1487	0.0098	0.0010	165	0.0051	0.0025	46.659	0.016	0.002	40.0008	0.0089	0.0022	0.0082	324.368,000	987.194,000									
11	Pesisir Selatan	Tanjung Jati	662,806,000	Berkembang	3	-	54.730	52	-	344	0.0023	0.0002	48	0.0015	0.0007	2.621	0.001	0.000	35.4478	0.0079	0.0020	0.0031	122.317,000	785.123,000									
12	Pesisir Selatan	Pagar Dalam	662,806,000	Berkembang	4	-	57.613	13	-	517	0.0034	0.0003	75	0.0023	0.0012	16.177	0.006	0.001	42.1727	0.0094	0.0024	0.0047	186.104,000	848.910,000									
13	Pesisir Selatan	Tanjung Setia	662,806,000	Berkembang	7	-	57.752	12	144.096,000	1979	0.0131	0.0013	257	0.0079	0.0040	32.130	0.011	0.002	34.1102	0.0076	0.0019	0.0088	350.733,000	1.157.635,000									
14	Pesisir Selatan	Biha	662,806,000	Berkembang	8	-	58.957	5	144.096,000	3141	0.0208	0.0021	341	0.0105	0.0053	37.836	0.013	0.002	26.6841	0.0060	0.0015	0.0108	427.888,000	1.234.790,000									
15	Pesisir Selatan	Way Jambu	662,806,000	Berkembang	9	-	49.302	113	-	1787	0.0118	0.0012	510	0.0157	0.0079	42.240	0.015	0.002	49.5301	0.0111	0.0028	0.0140	555.476,000	1.218.282,000									
16	Pesisir Selatan	Marang	662,806,000	Tertinggal	9	181.634,000	52.309	98	-	5631	0.0372	0.0037	535	0.0165	0.0083	112.521	0.039	0.006	24.9871	0.0056	0.0014	0.0192	761.477,000	1.605.917,000									
17	Pesisir Selatan	Tanjung Raya	662,806,000	Tertinggal	8	181.634,000	53.206	87	-	5676	0.0065	0.0006	416	0.0128	0.0064	38.046	0.013	0.002	51.8457	0.0116	0.0029	0.0119	473.188,000	1.317.628,000									
18	Pesisir Selatan	Bangun Negara	662,806,000	Berkembang	7	-	57.020	23	-	1980	0.0131	0.0013	214	0.0066	0.0033	19.922	0.007	0.001	39.5961	0.0088	0.0022	0.0079	311.536,000	974.342,000									
19	Pesisir Selatan	Ulok Manik	662,806,000	Tertinggal	6	-	54.884	49	-	1176	0.0078	0.0008	192	0.0059	0.0030	28.136	0.010	0.001	45.2739	0.0101	0.0025	0.0077	306.449,000	969.215,000									
20	Pesisir Selatan	Paku Negara	662,806,000	Berkembang	8	-	55.617	38	-	2126	0.0141	0.0014	351	0.0108	0.0054	47.183	0.016	0.002	53.1544	0.0119	0.0030	0.0122	485.217,000	1.148.023,000									
21	Pesisir Selatan	Tulang Bantan	662,806,000	Tertinggal	8	181.634,000	54.046	71	-	1134	0.0075	0.0007	329	0.0102	0.0051	39.899	0.014	0.002	38.1725	0.0085	0.0021	0.0100	397.589,000	1.242.029,000									
22	Lemong	Tanjung Jati	662,806,000	Tertinggal	6	-	54.568	57	-	318	0.0021	0.0002	172	0.0053	0.0027	47.003	0.016	0.002	50.1183	0.0112	0.0028	0.0081	321.135,000	983.941,000									
23	Lemong	Tanjung Sakti	662,806,000	Tertinggal	4	-	53.640	82	-	192	0.0013	0.0001	79	0.0024	0.0012	25.464	0.009	0.001	43.2312	0.0097	0.0024	0.0051	201.435,000	864.241,000									
24	Lemong	Way Batang	662,806,000	Berkembang	6	-	56.865	24	-	789	0.0052	0.0005	149	0.0046	0.0023	38.286	0.013	0.002	31.2177	0.0070	0.0017	0.0065	259.643,000	922.449,000									
25	Lemong	Lemong	662,806,000	Maju	8	-	57.283	20	-	1656	0.0109	0.0011	478	0.0148	0.0074	32.893	0.011	0.002	31.4782	0.0070	0.0018	0.0119	473.274,000	1.136.080,000									
26	Lemong	Cahaya Negeri	662,806,000	Tertinggal	6	-	52.526	97	-	433	0.0029	0.0003	180	0.0056	0.0028	15.189	0.005	0.001	51.4569	0.0115	0.0029	0.0067	266.712,000	929.518,000									
27	Lemong	Malaya	662,806,000	Berkembang	9	-	58.613	8	144.096,000	1631	0.0108	0.0011	518	0.0160	0.0080	26.423	0.009	0.001	47.2187	0.0105	0.0026	0.0131	518.694,000	1.325.596,000									
28	Lemong	Bambang	662,806,000	Tertinggal	6	-	55.692	36	-	681	0.0045	0.0005	198	0.0061	0.0031	48.352	0.017	0.003	46.5788	0.0104	0.0026	0.0086	341.496,000	1.004.302,000									
29	Lemong	Pagar Dalam	662,806,000	Maju	7	-	62.790	1	144.096,000	979	0.0065	0.0006	239	0.0074	0.0037	31.336	0.011	0.002	46.1311	0.0103	0.0026	0.0085	338.890,000	1.145.392,000									
30	Lemong	Bandar Pugung	662,806,000	Tertinggal	6	-	52.658	93	-	674	0.0045	0.0004	161	0.0050	0.0025	42.394	0.015	0.002	52.3034	0.0117	0.0029	0.0081	318.974,000	983.974,000									
31	Lemong	Penengah	662,806,000	Tertinggal	9	181.634,000	55.662	37	-	2003	0.0132	0.0013	520	0.0160	0.0080	63.450	0.022	0.003	50.0014	0.0112	0.0028	0.0154	611.840,000	1.456.280,000									
32	Lemong	Rata Agung	662,806,000	Tertinggal	7	-	51.828	103	-	1746	0.0115	0.0012	250	0.0077	0.0039	45.745	0.016	0.002	41.4194	0.0093	0.0023	0.0097	384.477,000	1.047.283,000									
33	Lemong	Sukamulya	662,806,000	Tertinggal	7	-	55.493	40	-	907	0.0060	0.0006	299	0.0092	0.0046	48.561	0.017	0.003	52.6842	0.0118	0.0029	0.0107	423.203,000	1.086.009,000									
34	Lemong	Parda Haga	662,806,000	Tertinggal	7	-	56.656	26	-	632	0.0042	0.0004	213	0.0066	0.0033	14.784	0.005	0.001	45.5601	0.0102	0.0025	0.0070	278.236,000	941.042,000									
35	Pesisir Utara	Kuripan	662,806,000	Berkembang	6	-	55.588	39	-	925	0.0061	0.0006	140	0.0043	0.0022	4.044	0.001	0.000	23.3409	0.0052	0.0013	0.0043	169.967,000	832.773,000									
36	Pesisir Utara	Padang Rindu	662,806,000	Tertinggal	6	-	52.619	95	-	852	0.0056	0.0006	167	0.0052	0.0026	2.247	0.001	0.000	38.9578	0.0087	0.0022	0.0056	215.489,000	878.295,000									
37	Pesisir Utara	Negeri Ratu	662,806,000	Tertinggal	7	-	53.982	72	-	1012	0.0067	0.0007	217	0.0067	0.0033	8.523	0.003	0.000	40.5821	0.0091	0.0023	0.0067	266.771,000	929.577,000									
38	Pesisir Utara	Kerbang Dalam	662,806,000	Tertinggal	6	-	52.226	99	-	526	0.0035	0.0003	143	0.0044	0.0022	5.243	0.002	0.000	48.9677	0.0109	0.0027	0.0056	220.593,000	883.399,000									
39	Pesisir Utara	Kota Karang	662,806,000	Tertinggal	7	-	55.471	41	-	711	0.0047	0.0005	209	0.0064	0.0032	7.190	0.002	0.000	33.1355	0.0074	0.0019	0.0059	234.746,000	897.552,000									
40	Pesisir Utara	Salam	662,806,000	Tertinggal	6	-	53.561	77	-	583	0.0039	0.0004	198	0.0062	0.0031	4.314	0.001	0.000	33.6413	0.0075	0.0019	0.0055	218.873,000	882.679,000									
41	Pesisir Utara	Way Narta	662,806,000	Tertinggal	4	-	52.021	82	-	429	0.0021	0.0003	67	0.0021	0.0010	5.243	0.001	0.000	35.8266	0.0061	0.0015	0.0046	80.676,000	351.293,000									
42	Pesisir Utara	Kerbang Langgar	662,806,000	Tertinggal	5	-	53.057	90	-	458	0.0030	0.0003	136	0.0042	0.0021	8.987	0.003	0.000	32.5889	0.0073	0.0018	0.0047	185.905,000	848.711,000									
43	Pesisir Utara	Walur	662,806,000	Tertinggal	6	-	55.302	44	-	1014	0.0067	0.0007	154	0.0048	0.0024	22.468	0.008	0.001	36.3424	0.0081	0.0020	0.0062	247.491,000	910.297,000									
44	Pesisir Utara	Batu Raja	662,806,000	Tertinggal	6	-	54.270	66	-	663	0.0044	0.0004	163	0.0050	0.0025	12.571	0.004	0.001	29.6410	0.0066	0.0017	0.0053	208.633,000	871.439,000									
45	Pesisir Utara	Pemancar	662,806,000	Tertinggal	6	-	53.936	73	-	668	0.0044	0.0004	186	0.0057	0.0029	18.828	0.006	0.001	46.6884	0.0104	0.0026	0.0069	273.454,000	936.260,000									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(13)+(16)+(19)+(21)	(24)	(25)=(4)+(7)+(10)+(23)
70	Way Krui	Gunung Kemala	662,806,000	Berkembang	7	-	58.676	7	144,096,000	1502	0.0099	0.0010	308	0.0095	0.0048	14.091	0.005	0.001	33.6668	0.0075	0.0019	0.0084	331,433,000	1,138,335,000
71	Way Krui	Labuhan Mandi	662,806,000	Tertinggal	7	-	54.704	54	-	975	0.0064	0.0006	288	0.0089	0.0044	10.395	0.004	0.001	33.3385	0.0074	0.0019	0.0075	297,056,000	959,860,000
72	Way Krui	Suka Baru	662,806,000	Berkembang	4	-	57.525	14	-	1138	0.0075	0.0008	80	0.0025	0.0012	1.348	0.000	0.000	45.6213	0.0102	0.0025	0.0046	182,654,000	845,460,000
73	Way Krui	Penggawa Lima	662,806,000	Berkembang	3	-	53.247	86	-	496	0.0033	0.0003	44	0.0014	0.0007	1.920	0.001	0.000	27.7774	0.0062	0.0018	0.0027	105,427,000	768,233,000
74	Way Krui	Gunungkemala Timur	662,806,000	Tertinggal	5	-	55.416	42	-	893	0.0062	0.0006	103	0.0032	0.0016	5.052	0.002	0.000	34.5977	0.0077	0.0019	0.0044	174,536,000	837,342,000
75	Krui Selatan	Batah Kencana	662,806,000	Berkembang	8	-	52.094	100	-	1775	0.0117	0.0012	372	0.0115	0.0057	10.540	0.004	0.001	23.4167	0.0052	0.0013	0.0088	347,771,000	1,010,577,000
76	Krui Selatan	Way Suluh	662,806,000	Berkembang	7	-	53.780	76	-	1022	0.0068	0.0007	257	0.0079	0.0040	4.494	0.002	0.000	22.6636	0.0051	0.0013	0.0061	243,550,000	906,356,000
77	Krui Selatan	Way Napal	662,806,000	Tertinggal	6	-	54.469	59	-	1155	0.0076	0.0008	201	0.0062	0.0031	6.725	0.002	0.000	25.0705	0.0056	0.0014	0.0056	222,673,000	885,479,000
78	Krui Selatan	Padang Haluan	662,806,000	Berkembang	8	-	55.971	31	-	1006	0.0067	0.0007	332	0.0102	0.0051	3.954	0.001	0.000	24.5557	0.0055	0.0014	0.0074	292,124,000	954,930,000
79	Krui Selatan	Lintik	662,806,000	Berkembang	7	-	57.139	22	-	1185	0.0078	0.0008	260	0.0080	0.0040	1.255	0.000	0.000	21.6184	0.0048	0.0012	0.0061	240,698,000	903,504,000
80	Krui Selatan	Walur	662,806,000	Maju	6	-	57.942	11	144,096,000	949	0.0063	0.0006	205	0.0063	0.0032	6.546	0.002	0.000	24.3536	0.0054	0.0014	0.0055	217,762,000	1,024,664,000
81	Krui Selatan	Pemerihan	662,806,000	Berkembang	5	-	47.985	115	-	899	0.0059	0.0006	137	0.0042	0.0021	3.370	0.001	0.000	19.5599	0.0044	0.0011	0.0040	157,689,000	820,495,000
82	Krui Selatan	Mandiri Sejati	662,806,000	Berkembang	5	-	54.537	58	-	508	0.0034	0.0003	104	0.0032	0.0016	4.199	0.001	0.000	24.1305	0.0054	0.0013	0.0035	139,061,000	801,867,000
83	Krui Selatan	Padang Raya	662,806,000	Tertinggal	6	-	50.408	109	-	877	0.0058	0.0006	203	0.0063	0.0031	4.494	0.002	0.000	27.0637	0.0060	0.0015	0.0055	216,441,000	879,247,000
84	Krui Selatan	Suka Jadi	662,806,000	Berkembang	7	-	54.711	53	-	758	0.0050	0.0005	233	0.0072	0.0036	3.658	0.001	0.000	22.7698	0.0051	0.0013	0.0056	220,456,000	883,262,000
85	Ngambur	Sumber Agung	662,806,000	Berkembang	7	-	54.218	68	-	2333	0.0154	0.0015	298	0.0092	0.0046	15.443	0.005	0.001	39.9489	0.0089	0.0022	0.0092	363,802,000	1,026,608,000
86	Ngambur	Ulok Mukti	662,806,000	Berkembang	10	-	57.466	16	-	2963	0.0196	0.0020	922	0.0285	0.0142	19.248	0.007	0.001	32.6957	0.0073	0.0018	0.0190	754,019,000	1,416,825,000
87	Ngambur	Negeri Ratu Ngambur	662,806,000	Tertinggal	8	181,634,000	50.088	111	-	2634	0.0174	0.0017	432	0.0133	0.0067	8.746	0.003	0.000	25.0734	0.0056	0.0014	0.0103	407,015,000	1,251,455,000
88	Ngambur	Pekon Mon	662,806,000	Tertinggal	8	181,634,000	57.465	17	-	2919	0.0193	0.0019	471	0.0145	0.0073	9.961	0.003	0.001	33.3107	0.0074	0.0019	0.0116	459,105,000	1,303,545,000
89	Ngambur	Gedung Cahya Kuninga	662,806,000	Berkembang	8	-	58.153	10	144,096,000	3259	0.0215	0.0022	415	0.0128	0.0064	32.639	0.011	0.002	36.0526	0.0081	0.0020	0.0123	486,366,000	1,293,268,000
90	Ngambur	Suka Banjar	662,806,000	Berkembang	7	-	59.596	4	144,096,000	2724	0.0180	0.0018	287	0.0089	0.0044	10.290	0.004	0.001	52.7893	0.0118	0.0029	0.0097	385,193,000	1,192,095,000
91	Ngambur	Suka Negara	662,806,000	Berkembang	8	-	54.065	70	-	1563	0.0103	0.0010	348	0.0107	0.0054	19.472	0.007	0.001	37.2266	0.0083	0.0021	0.0095	376,449,000	1,039,255,000
92	Ngambur	Muara Tembuluh	662,806,000	Berkembang	6	-	55.122	46	-	930	0.0061	0.0006	184	0.0057	0.0028	4.494	0.002	0.000	38.7053	0.0086	0.0022	0.0058	231,993,000	894,799,000
93	Ngambur	Bumi Ratu	662,806,000	Tertinggal	9	181,634,000	54.089	69	-	2158	0.0143	0.0014	570	0.0176	0.0088	4.585	0.002	0.000	42.7876	0.0096	0.0024	0.0128	509,706,000	1,354,146,000
94	Ngaras	Negeri Ratu Ngaras	662,806,000	Berkembang	7	-	60.046	3	144,096,000	837	0.0055	0.0006	273	0.0084	0.0042	55.214	0.019	0.003	39.5063	0.0088	0.0022	0.0098	389,912,000	1,196,814,000
95	Ngaras	Kota Batu	662,806,000	Sangat Tertinggal	6	-	51.515	104	-	780	0.0052	0.0005	202	0.0062	0.0031	41.941	0.014	0.002	47.2936	0.0106	0.0026	0.0084	334,965,000	997,771,000
96	Ngaras	Mulang Maya	662,806,000	Tertinggal	6	-	58.604	9	144,096,000	1058	0.0070	0.0007	193	0.0060	0.0030	63.510	0.022	0.003	54.1497	0.0121	0.0030	0.0100	396,209,000	1,203,111,000
97	Ngaras	Rajabasa	662,806,000	Sangat Tertinggal	6	-	52.595	96	-	988	0.0065	0.0007	157	0.0048	0.0024	34.451	0.012	0.002	52.9115	0.0118	0.0030	0.0078	309,949,000	972,755,000
98	Ngaras	Pardasuka	662,806,000	Tertinggal	6	-	55.907	33	-	1179	0.0078	0.0008	168	0.0052	0.0026	42.690	0.015	0.002	44.0185	0.0098	0.0025	0.0080	318,900,000	981,706,000
99	Ngaras	Padang Alam	662,806,000	Tertinggal	7	-	55.849	34	-	774	0.0051	0.0005	273	0.0084	0.0042	47.576	0.016	0.002	36.6264	0.0082	0.0020	0.0092	366,201,000	1,029,007,000
100	Ngaras	Suka Maju	662,806,000	Tertinggal	6	-	55.056	47	-	1803	0.0119	0.0012	182	0.0056	0.0028	64.206	0.022	0.003	46.9941	0.0105	0.0026	0.0099	394,590,000	1,057,396,000
101	Ngaras	Sukarame	662,806,000	Berkembang	6	-	57.319	18	-	1281	0.0085	0.0008	197	0.0061	0.0030	100.441	0.035	0.005	24.6364	0.0055	0.0014	0.0105	414,923,000	1,077,729,000
102	Ngaras	Bandar Jaya	662,806,000	Tertinggal	5	-	54.377	61	-	605	0.0040	0.0004	118	0.0036	0.0018	31.885	0.011	0.002	37.9907	0.0085	0.0021	0.0060	237,708,000	900,514,000
103	Bangkunat	Pagar Bukit	662,806,000	Berkembang	9	-	57.180	21	-	4555	0.0301	0.0030	755	0.0233	0.0116	121.219	0.042	0.006	31.1844	0.0070	0.0017	0.0227	899,504,000	1,562,310,000
104	Bangkunat	Tanjung Kemala	662,806,000	Tertinggal	9	181,634,000	52.801	92	-	1014	0.0067	0.0007	541	0.0167	0.0083	75.432	0.026	0.004	60.5191	0.0135	0.0034	0.0163	646,651,000	1,491,091,000
105	Bangkunat	Suka Marga	662,806,000	Tertinggal	10	181,634,000	54.389	60	-	2431	0.0161	0.0016	854	0.0264	0.0132	43.588	0.015	0.002	33.4419	0.0075	0.0019	0.0189	750,056,000	1,594,496,000
106	Bangkunat	Kota Jawa	662,806,000	Tertinggal	10	181,634,000	53.034	91	-	2640	0.0175	0.0017	1174	0.0362	0.0181	57.818	0.020	0.003	46.5944	0.0104	0.0026	0.0255	1,009,759,000	1,854,199,000
107	Bangkunat	Penyandingan	662,806,000	Berkembang	9	-	56.644	27	-	1770	0.0117	0.0012	645	0.0199	0.0100	36.294	0.013	0.002	38.1278	0.0085	0.0021	0.0151	600,197,000	1,263,003,000
108	Bangkunat	Bandar Dalam	662,806,000	Tertinggal	10	181,634,000	53.509	79	-	2226	0.0147	0.0015	1267	0.0391	0.0196	56.260	0.019	0.003	50.6552	0.0113	0.0028	0.0268	1,061,625,000	1,906,065,000
109	Bangkunat	Way Haru	662,806,000	Tertinggal	9	181,634,000	52.019	101	-	1715	0.0113	0.0011	829	0.0256	0.0128	42.016	0.014	0.002	45.6495	0.0102	0.0025	0.0186	739,793,000	1,584,233,000
110	Bangkunat	Pemerihan	662,806,000	Tertinggal	8	181,634,000	48.124	114	-	2331	0.0154	0.0015	341	0.0105	0.0053	117.119	0.040	0.006	43.5020	0.0097	0.0024	0.0153	606,635,000	1,451,075,000
111	Bangkunat	Suka Negeri	662,806,000	Tertinggal	9	181,634,000	54.289	65	-	1459	0.0096	0.0010	500	0.0154	0.0077	55.287	0.019	0.003	47.1681	0.0105	0.0026	0.0142	562,298,000	1,406,738,000
112	Bangkunat	Sumberejo	662,806,000	Berkembang	8	-	50.639	108	-	1633	0.0108	0.0011	321	0.0099	0.0050	64.334	0.022	0.003	48.5391	0.0108	0.0027	0.0121	478,901,000	1,141,707,000
113	Bangkunat	Siring Gading	662,806,000	Sangat Tertinggal	7	-	51.085	107	-	940	0.0062	0.0006	268	0.0083	0.0041	9.567	0.003	0.000	50.5914	0.0113	0.0028	0.0081	320,418,000	883,224,000
114	Bangkunat	Way Tias	662,806,000	Tertinggal	7	-	53.067	89	-	963	0.0064	0.0006	310	0.0096	0.0048	20.315	0.007	0.001	51.2396	0.0114	0.0029	0.0093	370,228,000	1,033,034,000
115	Bangkunat	Tanjung Rejo	662,806,000	Berkembang	9	-	53.833	75	-	2332	0.0154	0.0015	571	0.0176	0.0088	75.509	0.026	0.004	39.4807	0.0088	0.0022	0.0165	653,130,000	1,315,936,000
116	Bangkunat	Pagar Bukit Induk	662,806,000	Tertinggal	9	181,634,000	54.338	63	-	889	0.0059	0.0006	513	0.0158	0.0079	38.574	0.013	0.002	46.0061	0.0103	0.0026	0.0131	518,428,000	1,362,868,000
Total																								

SALINAN

Lampiran III
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 Januari 2020
TENTANG : TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PEKON PENERIMA ALOKASI AFIRMASI PADA
PENGHITUNGAN DANA DESA PER PEKON TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	PEKON
(1)	(2)	(3)
1	Pesisir Selatan	Marang
2	Pesisir Selatan	Tanjung Raya
3	Pesisir Selatan	Tulung Bamban
4	Lemong	Penengahan
5	Ngambur	Negeri Ratu Ngambur
6	Ngambur	Pekon Mon
7	Ngambur	Bumi Ratu
8	Bangkunat	Tanjung Kemala
9	Bangkunat	Suka Marga
10	Bangkunat	Kota Jawa
11	Bangkunat	Bandar Dalam
12	Bangkunat	Way Haru
13	Bangkunat	Pemerihan
14	Bangkunat	Suka Negeri
15	Bangkunat	Pagar Bukit Induk

Keterangan :
Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun pasal 7 berbunyi :
"Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan"

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 Januari 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

a. Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP... TAHUN ANGGARAN...
PEMERINTAH PEKON...
KECAMATAN...

Pagu Pekon : Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Orang)	UPAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1. 2	Pendapatan Transfer											
	Dana Desa											
	-. TAHAP PERTAMA											
	-. TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA											
2. 1	Bidang Penyelenggara Pemerintahan											
2. 1. 1	Kegiatan...											
2. 1. 2	dst...											
2. 2	Bidang Pembangunan Desa											
2. 2. 1	Kegiatan...											
2. 2. 2	dst...											
2. 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2. 3. 1	Kegiatan...											
2. 3. 2	dst...											
2. 4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan											
2. 4. 1	Kegiatan...											
2. 4. 2	dst...											
	Bidang Tak Terduga											
	Kegiatan...											
	dst...											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3. 2	Pengeluaran Pembiayaan											
3. 2. 1	Penyertaan Modal Desa											
	-. Modal Awal											
	-. Pembangunan Usaha											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)											

Bendahara Pekon

ttd

.....

Disetujui oleh,
Pekon...,tanggal...bulan...tahun
PERATIN...

ttd

.....

SALINAN

b. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA
TAHAP... TAHUN ANGGARAN...
PEMERINTAH PEKON...
KECAMATAN...

Sumber : DANA DESA

Realisasi s.d

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	2	4	6	7
4	PENDAPATAN			
1. 2	Pendapatan Transfer			
	Dana Desa			
	-. TAHAP PERTAMA			
	-. TAHAP KEDUA			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
2. 1	Bidang Penyelenggara Pemerintahan			
2. 1. 1	Kegiatan...			
2. 1. 2	dst...			
2. 2	Bidang Pembangunan Desa			
2. 2. 1	Kegiatan...			
2. 2. 2	dst...			
2. 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2. 3. 1	Kegiatan...			
2. 3. 2	dst...			
2. 4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan			
2. 4. 1	Kegiatan...			
2. 4. 2	dst...			
	Bidang Tak Terduga			
	Kegiatan...			
	dst...			
	JUMLAH BELANJA			
6	PEMBIAYAAN			
3. 2	Pengeluaran Pembiayaan			
3. 2. 1	Penyertaan Modal Desa			
	-. Modal Awal			
	-. Pembangunan Usaha			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)			

Pekon, Tanggal Bulan dan Tahun
Peratin Pekon

ttd

Nama Peratin

c. Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Kabupaten

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN PESISIR BARAT
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

PROVINSI : KABUPATEN :
JUMLAH PEKON : KECAMATAN : TAHUN:

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) DALAM TOTAL KABUPATEN PESISIR BARAT								
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNT ING
JUMLAH								

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) DALAM TOTAL KABUPATEN PESISIR BARAT							
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA				
JUMLAH							

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK KAB PESISIR BARAT						
SASARAN	INDIKATOR			REKAPITULASI LAPORAN DESA		
				TOTAL DESA DALAM KB	JML LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0- 2) TAHUN	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	##	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2- 6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN PESISIR BARAT			
TOTAL DESA DALAM KABUPATEN	JUMLAH DESA DIUKUR	JUMLAH DESA >20% KONVERGENSI	% (PERSEN)

TABEL 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN PESISIR BARAT						
NO	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING
		TOTAL DESA DALAM KB	JML LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA		ALOKASI DANA % (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					

MENGESAHKAN
PERATIN

ttd
(.....)

....., 2020

(PENYUSUN)

ttd
(.....)

SALINAN

d. Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Pekon

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT PEKON TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
PEKON : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0- 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)		MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH					

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0- 2) TAHUN	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	#	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI PEKON				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI PEKON				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA PEKON DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% PERSEN
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKA			

....., 2020

MENGESAHKAN
PERATIN

(PENYUSUN)

ttd

ttd

(.....)

(.....)

SALINAN

e. Format surat pengantar penyaluran dana desa



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pelabuhan Kuala StabasKec. Pesisir TengahKode Pos34874
Email:bpkad.kpb@gmail.com

Krui,..... 2020

Kepada
Yth. Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor :

No	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap, dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) perhitungan rincian Dana Desa setiap Pekon dan Daftar Rekening KasPekon *)

*) Khusus tahap I

**a.n. BUPATI PESISIR BARAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**

Nama
Pangkat
NIP

SALINAN

f. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Pekon

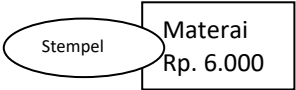
KOP PEKON

Telah terima dari	:	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Untuk keperluan	:	Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten Pesisir Barat
Dengan rincian	:	

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :
Nomor Rekening : *Nomor Rekening Penerima Dana*
Nama Rekening : *Nama Rekening Penerima Dana*
Nama Bank : Bank Lampung

Pekon, tanggal bulan dan tahun
Peratin Pekon



Nama Jelas Peratin

SALINAN

g. Format surat pernyataan kebenaran penerimaan penyaluran dana desa



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pelabuhan Kuala StabasKec. Pesisir TengahKode Pos34874
Email:bpkad.kpb@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENERIMAAN
PENYALURAN DANA DESA**

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemda : Kabupaten Pesisir Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap Batch ke-..... sebagaimana daftar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir, sebagai berikut:

- a. Sudah layak salur berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran sesuai ketentuan;
- b. Nomor dan nama rekening Pekon sudah sesuai dengan data Rekening Kas Pekon;
- c. Besaran penyaluran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
- d. Porsi penyaluran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krui, 2020

Nama
Jabatan
NIP

Catatan :
Batch penyaluran berdasarkan daftar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa yang dicetak dari aplikasi OMSPAN

SALINAN

h. Format surat kuasa pemindahbukuan dana desa

BUPATI PESISIR BARAT

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati Pesisir Barat
Alamat : Jl. Kesuma No. 07 Krui Kec. Pesisir Tengah

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN Liwa
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Alamat : Jalan Raden Intan, Way Mengaku, Liwa

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Pekon pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2020.

Krui, 2020

Materai
Rp. 6000

(nama dan tanda tangan Bupati)

Jl. Kesuma No.07 Krui Kec. Pesisir Tengah- Kode Pos 34874
Telp/fax: (0728) – 51007

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**